

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

SITI ASIYAH

NIM. 130 212 0222

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2017 M / 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

NAMA : SITI ASIYAH

NIM : 130 212 0222

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S-1)

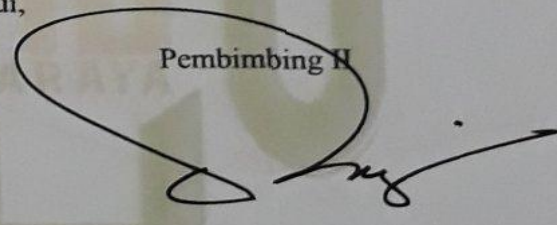
Palangka Raya, November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

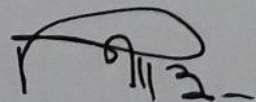

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MH.I
NIP. 198207072006641003

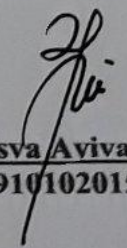

Sofyan Hakim. MM
NIK. 198501232016092722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Dra. Hj. Rahmaniar, M, SI
NIP. 198207072006641003


Itsla Yunisva Aviva, M.E Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Palangka Raya, November 2017

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Siti Asiyah**

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum WR.WB.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : **SITI ASİYAH**

NIM : **130 212 0222**

Judul : **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN
ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.**

Sudah dapat di ujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

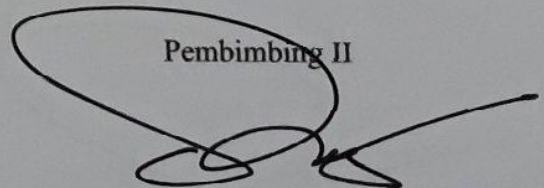
Wassalamu 'alaikum WR.WB.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MH.I
NIP. 19820707200641003

Pembimbing II



Sofyan Hakim, MM
NIK.198501232016092722

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** Oleh Siti Asiyah NIM : 1302120222 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 November 2017

Palangka Raya 14 November 2017

1. **Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Muzalifah, M.SI**
Penguji Utama/Anggota

(.....)

3. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MH.I**
Penguji II/Anggota

(.....)

4. **Sofyan Hakim. MM**
Sekretaris Sidang/Anggota

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK

Oleh SITI ASIAH

Di Kalimantan tengah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kegiatan membakar lahan ini ditakutkan mengakibatkan kebakaran yang tidak terkendali dan merugikan orang banyak. Dalam ekonomi hijau kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan merusak lingkungan dan berpolusi merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di Provinsi Kalimantan Tengah? (2) Bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah ?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian karhutla di kota Palangka Raya. Subjek dari penelitian ini adalah dua orang dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan satu orang dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dengan satu informan. Prosedur pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan di terapkan pelarangan membakar, pemerintah memberikan solusi atas kebijakan yang ada dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dan Pengendalian karhutla di Kota Palangka Raya sudah membaik sejak kejadian kebakaran hutan yang parah pada tahun 2015 dengan dirasakan dan dilihatnya bencana asap yang sudah tidak terlihat.

Kata kunci : Ekonomi hijau, *green economy*, kebakaran hutan dan lahan.

**THE APPLICATION OF GREEN ECONOMY PRINCIPLES
IN FOREST AND LAND FIRES (KARHUTLA) CONTROL
IN KALIMANTAN TENGAH PROVINCE**

ABSTRACT

By. SITI ASIYAH

In Central Kalimantan, the habit of people is still doing land clearing by burning the forest and lands. This activity is feared will lead to an uncontrolled fire and it can harm the crowds. In a green economy, economic activity should not be done by damaging the environment and polluting, it can harm other people. This research aims to determine and analyze (1) how the application of green economy principles in Palangka Raya city ? and (2) how The Forest and Land Fires (KARHUTLA) Control in the city of Palangka Raya ?.

This study uses descriptive qualitative method. The object of this study is the application of the green economy principles in the Forest and Land Fires (KARHUTLA) Control of Palangka Raya city. While, the subject of this study are two persons from The Forest Service of Central Kalimantan Province (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah) and one person from the Regional Disaster Management Agency (Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah). The data were collected by observation, interview and documentation method. While, the data analysis were obtained by several stages, they are data collection, data reduction, data presentation and draw conclusions.

The result of this study is the application of green economy principles in Palangka Raya city is good enough by implementing the ban of burn forest and lands and by giving solutions on the existing policy. Beside, the Forest and Land Fires (KARHUTLA) Control in Palangka Raya City has improved since the worst forest fires which happened in 2015.

Keywords: Green economy, forest fire.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan *Taufiq, Rahmat* dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH. MH. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya. Sekaligus sebagai dosen pembimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.

4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Sadiani, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
6. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E. Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
7. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.ThI, M.SI selaku dosen penasihat akademik selama menjalani perkuliahan di IAIN Palangka Raya.
8. Bapak Sofyan Hakim, MM selaku dosen pembimbing peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka serta teman-teman mahasiswa ESY yang telah membantu peneliti selama penelitian.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palangka Raya, November 2017
Peneliti,

SITI ASIYAH
130 212 0222

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017

 Peneliti

6000
ENAM RIBU RUPAH
SITI ASYIAH
NIM. 130 212 0222

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S. AL- 'ARAF ayat 56)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan juga sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasululah SAW. Dengan ini kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.

- ✚ Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Asnayani dan Mariam ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta doa-doa yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku. Ulun sayang buhan pian.
- ✚ Untuk kakak-kakakku semua, terimakasih atas do'a, bantuan, dan kasih sayang kalian selama ini, ku persembahkan karya kecil ini untuk kalian.
- ✚ Untuk teman-temanku semua terimakasih atas bantuan, do'a, nasihat, kritik, semangat, tawa canda, dan tangis yang kalian berikan selama ini. Terimakasih atas semua kenangan ini, semoga kita semua bisa sukses dan selalu menyayangi. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Love u guys. Xoxo
- ✚ Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
- ✚ Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang sangat membantu dalam proses penulisan karya ini hingga terselesaikan.
- ✚ Untuk kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

— ُ —	Dammah	Ditulis	U
-------	--------	---------	---

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II DESKRIPSI TEORITIK.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Deskripsi Teori.....	14

1. Pengertian Penerapan	14
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).....	14
3. Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>)	16
4. Prinsip Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>).....	22
5. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	27
6. Produksi.....	28
7. Produksi dalam <i>Maqasid Al Syari'ah</i>	32
8. <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> dalam Menghindari Negative Externalities.....	34
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
C. Subjek Dan Objek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Pengabsahan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Tentang Kota Palangka Raya.....	45
2. Gambaran Dinas Kehutanan Kota Palangka Raya	48
3. Gambaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49
B. Pemaparan Data Tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) Dalam Pengendalian Karhutla Di Kota Palangka Raya.....	50
1. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) Di Kota Palangka Raya	51

2. Pengendalian Karhutla di Kota Palangka Raya.....	67
C. Analisis Data Tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) Dalam Pengendalian Karhutla Di kota Palangka Raya.....	71
1. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Di Kota Palangka Raya.....	71
2. Pengendalian Karhutla Di kota Palangka Raya.....	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan penelitian terdahulu
Tabel 2.1	Luas wilayah kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah

DAFTAR SINGKATAN

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
UNEP	: <i>United Nation Environment Programme.</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sendiri adalah kegiatan yang di dalamnya melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan Produksi disini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan.¹ Produksi merupakan kegiatan menambah *faedah* (kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat dan lain-lain. Untuk memenuhi kegiatan tersebut dibutuhkan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam proses produksi seperti tanah, air, udara dan bahan tambang.

Sumber daya alam memiliki dua sifat yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua kekayaan alam harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga

¹ M.Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 147.

memberi manfaat besar bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia begitu kaya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Aneka bahan tambang terkandung pula didalam perut bumi Indonesia. Diantaranya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik tidak memberikan emisi karbon, eksploitasi dan merusak lingkungan hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam harus memikirkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial. Indonesia pernah tercatat menguasai 10 % luas hutan tropis yang tersisa didunia (sekitar 100 juta hektar) dan berada di urutan kedua setelah Brasil, namun penghargaan itu hanya mampu dipertahankan sampai tahun 1995 saja. Dan Indonesia pada tahun 2006 dinobatkan menjadi negara yang juga urutan kedua, namun dalam hal laju kehilangan hutan terbanyak, yakni sebesar 1,8 juta hektar pertahun dalam kurun waktu 2000-2005 (FAO). Di tahun 2007, luas hutan Indonesia pun diperkirakan hanya tinggal 88 juta hektar dan juga menjadi hanya peringkat ke-8 dunia setelah Kongo dalam hal penguasaan hutan tropis yang tersisa di dunia.² Sangat sedikit masyarakat yang menyadari bahwa kelestarian hutan sangatlah penting. Pemikiran orang pada umumnya adalah hutan lebih menguntungkan untuk dialihfungsikan

² www.reddplus.go.id/berita/opini-dan-kajian/352-ekonomi-hijau-solusi-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan (<http://alamendah.org/2012/06/03/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy/>) (Di browser pada hari senin, 9 Mei 2016 pukul 07:30 WIB).

menjadi lahan tambang, perkebunan ataupun ditebang secara serampangan untuk dijual sebagai kayu gelondongan.³

Berdasarkan ancaman-ancaman yang timbul dari eksploitasi sumberdaya alam yang marak terjadi di Indonesia, yang beberapa dipicu oleh kegiatan ekonomi yaitu sebagai alat atau bahan produksi yang menimbulkan keuntungan jangka pendek tanpa menghitung nilai kerugian dari kerusakan lingkungan habitat berbagai macam spesies yang hilang untuk generasi selanjutnya. Maka pada tahun 2012 Pemerintah menjadikan hari lingkungan hidup dunia bertemakan “Ekonomi Hijau atau *Green Economy*”. Beberapa hal yang ditekankan didalam Ekonomi hijau adalah upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Menurut UNEP; *United Nations Environment Programme* dalam laporannya yang berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, *Green Economy* adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. *Green Economy* ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. pengertian sederhananya ekonomi hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon(tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.⁴

Dilihat dari pengertian dan tujuan dari ekonomi hijau yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak jauh berbeda dengan teori produksi dalam ekonomi Islam yang mana dalam memproduksi suatu dalam

³*Ibid.*

⁴ <http://alamendah.org/2012/06/03/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy/>
(Di browser pada hari senin, 9 Mei 2016 pukul 07:30 WIB).

melakukan produksi tidak berlebihan dalam pemanfaatan bahan maupun tenaga kerja yang hanya akan memenuhi kepuasan dari satu pihak. Namun, produksi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya bahan maupun tenaga kerja agar terciptanya komoditas yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan.

Di Kalimantan Tengah sendiri tepatnya di kota Palangka Raya hampir setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama. Kebakaran yang terjadi setiap tahunnya membuat polusi asap pekat yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, baik itu kesehatan, ekosistem bahkan kegiatan ekonomi yang juga terhambat.

Kejadian kebakaran hutan yang melanda kota Palangka Raya ditemukan beberapa pemberitaan bahwa pembakaran lahan diduga sengaja dibakar oleh pihak perusahaan. Seperti pada Radar Sampit online dengan judul bacaan “Diduga Sengaja Bakar Lahan, Tiga Perusahaan Dipasangi Garis Polisi” disitu berisi berita bahwa :

“Dari lima yang kita dalam, area kebakaran ditiga perusahaan kita police line, kata Kapolda Kalteng Brigjen Pol Fakhri melalui Dirreskrimsus Kombes Pol Anton Sasono, Jumat(11/9).”⁵

Kebiasaan masyarakat lokal yang membuka lahan dengan cara membakar agar lahan yang digarap bisa menjadi subur. Namun, pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan peraturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Peraturan tersebut

⁵<http://m.sampit.prokal.co/read/news/229-diduga-sengaja-bakar-lahan-tiga-perusahaan-dipasangi-garis-polisi.html> (Di akses pada hari selasa, 10 Mei 2016 pukul 08:30 WIB).

jelas berdampak bagi petani yang membakar lahan karena itu merupakan mata pencaharian mereka. Namun demikian pemerintah juga mengeluarkan kebijakan cetak lahan sebagai solusi atas pelarangan pembakaran lahan.

Berdasarkan informasi awal tersebut menarik untuk melihat apakah kebijakan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan ekonomi hijau yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi selain memberikan keuntungan bagi masyarakat namun juga harus mempertimbangkan kelestasian alam. Dari sini peneliti ingin melihat bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Di Provinsi Kalimantan Tengah dan bagaimana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu peneliti melakukan spesifikasi penelitian terfokus kepada sesuatu yang ada didalamnya dengan menulis karya ilmiah yang berjudul : **“PENERAPAN PRINSIP EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHTUTLA) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan mempersempit masalah yang akan dibahas supaya tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah. Pada penelitian ini kajian dilakukan pada provinsi Kalimantan Tengah namun peneliti melihat ke wilayah yang sering terjadi kebakaran seperti Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya. Kemudian pada penelitian ini penulis melihat kepada kebijakan hutan dan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Di Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana Pengendalian Karhutla Di Provinsi Kalimantan Tengah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang diambil yaitu :

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengendalian Karhutla Di Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Sebagai bentuk kongkrit kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dibidang ilmu ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pada Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari 3 bab yaitu akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, didalam bab ini yang akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Deskripsi Teori, didalam bab ini berisi tinjauan tentang : penelitian terdahulu, deskripsi teori, dan kerangka pikir.
- Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari : Waktu dan tempat penelitian, Jemis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV Pada bab ini dituangkan hasil penelitian dan pembahasan. Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, serta analisis data.
- Bab V Penutup, memaparkan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DESKRIPSI TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data. Dalam hal ini berkaitan dengan tema penulis yaitu mengenai Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Pengendalian Karhutla di Kota Palangka Raya.

Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi hijau pernah dilakukan oleh Hidayatul Khakimah pada tahun 2016, dengan judul praktik Tinjauan yuridis tentang peran negara dalam moratorium pembukaan lahan baru di sektor kehutanan sebagai upaya mewujudkan green constitution. Penelitian ini fokus pada implikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan yang semakin parah. Penggunaan disektor kehutanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penegakan Pemberantasan kerusakan hutan belum mampu mengakomodir pengendalian kerusakan lingkungan di sektor kehutanan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena belum terdapatnya prinsip-prinsip *green constitution* yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya tegas dalam mewujudkan *green constitution* dalam pemulihan hutan adalah melalui moratorium hutan yang kemudian

diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden sebelumnya. Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.⁶

Skripsi I Gusti Putu Diva Awatara pada tahun 2015, dengan judul Tingkat Kinerja Perusahaan Agroindustri Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Menuju Sistem Ekonomi Hijau di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ditinjau dari komitmen perusahaan, implementasi biaya, budaya perusahaan, orientasi perusahaan, manajemen lingkungan proaktif dan dorongan manajemen lingkungan sebagai perwujudan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan; mengidentifikasi dan melakukan penilaian moneter manfaat yang diterima masyarakat; mengevaluasi manfaat langsung yang diperoleh perusahaan setelah menerapkan kebijakan manajemen lingkungan serta mengetahui komponen yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem manajemen lingkungan menuju sistem ekonomi hijau di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan komitmen perusahaan dilihat dari kebijakan lingkungan dimasing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari setiap kegiatan

⁶ Hidayatul Khakimah, *Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan Green Constitution*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2016.

lingkungan. Implementasi biaya dilakukan berupa dana tanggap darurat dan dana regular. Budaya perusahaan perlu perbaikan terutama dalam merubah perilaku karyawan untuk fokus meningkatkan kepedulian tinggi pada lingkungan, motivasi kuat untuk mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan. Orientasi perusahaan dalam setiap kebijakan organisasi, tujuan dan target didasarkan pada pengetahuan tentang aktivitas dan pengaruhnya pada lingkungan.⁷

Skripsi Ali Prakosa pada tahun 2007, dengan judul Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blora). Penelitian ini merupakan suatu studi kasus di Pengadilan Negeri Blora yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana yang telah dilakukan di PN Blora dalam kasus *illegal logging* berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Blora dalam menangani hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana kasus *illegal logging* tersebut.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Blora berdasarkan Undang-

⁷ I Gusti Putu Diva Awatara, *Tingkat Kinerja Perusahaan Agroindustri Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Menuju Sistem Ekonomi Hijau Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2015.

undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum berhasil meminimalisir tingkat kejahatan kasus *illegal logging* di Kabupaten Blora. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Blora baik pidana penjara atau denda sangat rendah sehingga orientasi kebijakan pidana dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan yang pada dasarnya menganut tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Relatif tidak dapat diwujudkan.

Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Blora adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi dan situasi dari masyarakat Kabupaten Blora, faktor yang berkaitan dengan tingginya permintaan akan kayu, terutama kayu jati serta faktor kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum di Kabupaten Blora dalam penanganan kasus tindak pidana *illegal logging*. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Blora dalam mencegah dan menanggulangi kasus *illegal logging* di Kabupaten Blora adalah dengan meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum karena dengan koordinasi yang kuat maka tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antar instansi dapat dihindari sehingga konflik kepentingan antar instansi penegak hukum tidak akan terjadi serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan baik yang berupa pidana penjara,

pidana denda maupun pidana perampasan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora.⁸

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hidayatul Khakimah, Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan Green Constitution, 2016.	Sektor kehutanan, penghijauan.	Membahas ekonomi hijau.
2.	I Gusti Putu Diva Awatara, Tingkat Kinerja Perusahaan Agroindustri Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Menuju Sistem Ekonomi Hijau Si Indonesia, 2015, Penelitian Lapangan.	Membahas ekonomi hijau.	Kinerja perusahaan.

⁸ Ali Prakosa, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)*, Universitas Sebelas Maret, 2007.

3.	Ali Prakosa, Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora), 2007, Penelitian Lapangan.	Membahas kehutanan.	Membahas ekonomi hijau.
----	--	---------------------	-------------------------

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti 2017.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa, "penerapan adalah pengenaan perihal mempraktikan".⁹

Menurut Bloom dan Krathwol yang dikutip oleh Usman menyatakan, "penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari dari situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan prinsip".¹⁰

2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹¹ Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial,

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hal. 915.

¹⁰ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.¹²

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.¹³

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan, Hutan Tanaman Industri, penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya.¹⁴ Dampak negative yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu

¹² Alam Setia Z, *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998 hal. 2.

¹³ Mea Saputra, <http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 14.40 WIB).

¹⁴ *Ibid.*

kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.¹⁵

3. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Konsep sumber milik bersama (*common property resources*) oleh Hardin dikenal dengan apa yang disebut sebagai “*tragedy of pie commons*” digunakan untuk menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi dapat mengarah kepada kerusakan lingkungan hidup. Berjuta-juta pemilik mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber milik bersama, seperti samudera, udara, ikan di laut, air, tanah, hutan dan lain-lainnya. Tidak ada satupun aturan yang membatasi pemanfaatan sumber milik bersama tersebut, maka terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber tersebut. Setiap pemanfaat mungkin menggunakannya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa orang lain akan memanfaatkan sumber tersebut bila tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.¹⁶

Berdasarkan kacamata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme keseimbangan yang timbul secara sendiri yang dapat membatasi eksploitasi. Sumber-sumber milik bersama ini (misalnya air, udara, lahan) adalah “gratis” (*free*) sehingga kelangkaan yang nyata tidak dicerminkan dalam ongkos untuk setiap pemanfaatannya. Mengikutsertakan ongkos sosial yang riil pada eksploitasi sumber-sumber alam

¹⁵ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Widyaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, Edisi 1 Nomor 4 Oktober – Desember 2014, hal. 47-59.

¹⁶ Surna Tjahja D,dkk , *Green Economy Ekonomi Hijau edisi revisi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2014, hal. 5.

dalam perencanaan pembangunan adalah salah satu cara yang dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan alokasi sumber-sumber dibuat berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori faktor luar (*externality*) menawarkan suatu alternatif eksploitasi dan penyebab kerusakan lingkungan hidup.¹⁷

Dengan semakin memprihatinkannya berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan ditingkat global dan lokal, khususnya perubahan iklim (*climate change*), beberapa waktu yang lalu Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan seminar dengan tema Ekonomi Hijau. Seminar ini adalah upaya untuk mengembangkan konsep ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi untuk suatu dunia nyata, dunia kerja, kebutuhan manusia, material yang ada pada bumi ini, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi suatu jalinan keterkaitan yang harmonis, terutama ‘nilai guna’ dan bukan ‘nilai tukar’ atau uang, yang peduli terhadap kualitas bukan kuantitas, yang peduli tentang regenerasi dari individu, komunitas, dan tatanan lingkungan (*ecosystem*), dan bukan akumulasi dari uang atau material.¹⁸

Pada Oktober 2008, UNEP mencetuskan gagasan mengenai “*Green Economy*” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “*green economy*” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi

¹⁷ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 129-130.

“*green economy*” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.¹⁹

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep *Green Economy* semakin mendapat perhatian karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Namun demikian, perlu ditandakan bahwa hubungan antara konsep ekonomi hijau ini dengan konsep yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, belum dapat diartikulasikan dengan jelas. Konsep modern *Green Economy* merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep *Green Economy* yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*economy to green requirements*).²⁰

Konsep modern dalam perspektif ini *Green Economy* tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas- aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan; tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari *Green*

¹⁹ Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, *Langkah menuju ekonomi Hijau, Sintesa dan Memulainya*. hal 3.

²⁰ *Ibid.*

Economy pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental.²¹

Ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.²²

Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, *United Nation Environment Programme* (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau juga sebagai alat/sarana yang diharapkan mampu memberikan tiga keluaran, yaitu :

1. Adanya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru,

²¹ *Ibid.*

²² Hijauku, <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/> (Diakses pada hari rabu tanggal 01 Maret 2017 pukul 12.30 WIB).

2. Emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah, serta
3. Memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, meskipun tujuan sosial tersebut kadang-kadang kadang tidak terjadi secara otomatis. Namun, tujuan sosial tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan *green economy*.²³

Dengan demikian ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberikan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.²⁴

4. Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Prinsip adalah suatu pernyataan fundametal atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Ida Nurlinda, *Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Hal. 7.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2005 hal. 896.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi hijau terdapat sepuluh prinsip Ekonomi Hijau, sebagai berikut :²⁶

1. Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas ini adalah prinsip dasar dari ekonomi hijau sebagai ekonomi pelayanan, terpusat pada hasil akhir dan kebutuhan lingkungan. Bahan utama adalah sarana untuk kepuasan akhir dari kebutuhan riil, dan secara radikal dapat dikonservasikan. Uang juga harus dikembalikan pada status sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaharuan dari pertukaran, dari pada hasil akhirnya. Apabila hal ini bisa dilaksanakan secara signifikan pada kegiatan ekonomi, maka kekuatan nilai uang pada seluruh kegiatan ekonomi dapat dikurangi.
2. Mengikuti aliran alam, ekonomi bergerak bagaikan kapal yang berlayar dengan tiupan angin sebagai suatu proses yang alamiah. Tidak hanya solar dan energi yang diperbaharukan, tetapi juga dengan siklus hidrologi yang alamiah, vegetasi regional dan jaring-jaring makanan, serta dengan material lokal. Masyarakat menjadi lebih peka terhadap aspek ekologi sehingga batas politik dan ekonomi akan menjadi seiring dengan batas ekosistem, dan menumbuhkan konsep dan kegiatan bioregional.²⁷
3. Sampah adalah makanan, alam tidak mengenal sampah sehingga setiap keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain. Prinsip

²⁶ Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013 hal. 201.

²⁷ *Ibid.*, hal. 202.

ini tidak hanya mempunyai implikasi pada tingginya kompleksitas organisasi tetapi juga keluaran produk sampingan harus cukup bergizi dan tidak memiliki toksin sehingga dapat menjadi asupan bagi kegiatan lainnya.

4. Rapih dan keragaman fungsi, jaring-jaring makanan yang kompleks adalah implikasi berbagai hubungan yang terintegrasi dimana secara diametris bertolak belakang dengan segmentasi dan fragmentasi masyarakat industri. Dalam hal ini setiap strategi penyelesaian masalah bertumpu pada kemenangan bersama serta nilai positif dari kegiatan lain.
5. Skala tepat guna/skala keterkaitan, hal ini tidak mengandung arti bahwa '*small is beautiful*' (kecil itu indah) tetapi mengandung arti bahwa setiap aktivitas generatif mempunyai skala operasional yang paling tepat guna. Sekecil-kecilnya aktivitas akan mempunyai dampak lebih besar. Ini juga merupakan aktivitas ekologi yang 'murni' yaitu suatu rancangan terintegrasi dalam skala berganda dan merefleksikan pengaruh yang besar terhadap yang kecil dan sebaliknya.²⁸
6. Keanekaragaman, dalam dunia dengan perubahan yang terus-menerus, kesehatan dan stabilitas akan tergantung pada keanekaragaman. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan/keanekaragaman (jenis tumbuhan, binatang, ekosistem, dan regional), juga keanekaragaman sosial dan organisasi ekologis.

²⁸ *Ibid.*, hal. 203.

7. Kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri, merupakan suatu sistem yang kompleks membutuhkan 'hirarki sarang' dari intelegensia yang mengkoordinasikan sistemnya sendiri dalam suatu gerakan terstruktur.
8. Partisipasi dan demokrasi langsung, agar mampu fleksibel dan tangguh, rancangan ekonomi yang berbasis ekologi harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
9. Kreativitas dan pengembangan masyarakat, mengubah tempat sumber produksi menuju suatu produktivitas alam yang spontan memasyarakatkan suatu kreativitas. Dibutuhkan pengembangan manusia dengan wawasan holistic sehingga dibutuhkan juga suatu 'semaian' yang berkualitas. Yaitu kualitas dalam menyampaikan dan dalam situasi yang sebenarnya, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologi dari suatu sistem industrial. Dalam perubahan hijau, maka pribadi dan politik sampai sosial dan ekologi berjalan seiring. Sosial estetika, dan kapasitas spiritual menjadi pusat untuk mencapai efisiensi ekonomi dan merupakan suatu tujuan yang penting.
10. Peran strategis dalam lingkungan buatan, lanskap dan perancangan spasial, efisiensi yang besar mampu dilaksanakan melalui pengaturan spasial dari sistem komponen suatu kegiatan. Kerapihan, pemanfaatan bersama, rancangan terintegrasi yang bergerak bersama alam merupakan landasan, sehingga perbaikan konversi dan efisiensi pada

pengaturan spasial memberi dampak positif pada seluruh kegiatan ekonomi.²⁹

5. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan instrument pemerintah yang tidak hanya menyangkut tentang aparatur negara, tetapi juga terkait dengan *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.

Menurut Carl Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.³⁰

Mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah membuat banyak kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi dan upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan Pemerintah mengenai upaya kebakaran hutan dan lahan ini telah dibuat dari tingkatan atas sampai bawah, yaitu dari UUD sampai

²⁹ *Ibid.*, hal. 204.

³⁰ Bahri Arif Mustofa, *Implementasi Kebijakan Larangan Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam wilayah kota bandar lampung*, Skripsi Universitas Lampung, 2016 hal 9.

dengan Peraturan Gubernur (Pergub) guna untuk memperjelas dari kebijakan diatasnya.

Berikut beberapa Kebijakan UUD sampai dengan Perda yang dibuat untuk kebakaran hutan dan lahan.

- a. UUD Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,
- b. UUD Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan,
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan,
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan
- f. Peraturan Daerah (PERDA-Kalimantan Tengah) Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

6. Produksi

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.³¹ Produksi juga berarti kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan

³¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 185.

konsumsi sering kali dilakukan sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output. Dalam aktivitas produksinya produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa.³² Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi adalah menambah nilai guna suatu barang atau jasa.

Beberapa ekonom muslim turut pula mendefinisikan mengenai produksi dalam perspektif Islam :

- a. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perpektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

³² M.Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi Konvensional . . .* hal. 148.

Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa kegiatan produksi dalam perpektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktifitas ekonomi. Secara garis besar dari masing- masing definisi adalah setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, dimana produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia.³³

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam yaitu khilafah dan adil.

Secara lebih perinci nilai- nilai Islam dalam produksi meliputi :³⁴

1. Berwawasan jangka panjang, hal ini berarti produsen dalam memproduksi tidak hanya berorientasi keuntungan jangka pendek namun juga harus berorientasi jangka panjang.
2. Menepati janji dan kontrak. Seorang produsen muslim tidak akan pernah mengkhianati kontrak kerja yang disepakati demi mencari keuntungan yang lebih besar.
3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Seseorang produsen muslim harus jujur dalam menakar, hal ini akan berimbas pada peningkatan kepercayaan konsumen kepada produsen.

³³ *Ibid.*, hal. 151-152.

³⁴ *Ibid.*, hal 161.

4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Seorang produsen harus disiplin dalam bekerja, sehingga ia mampu memenuhi batas waktu dalam setiap kontrak kerjanya.
5. Memuliakan prestasi atau produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka akan semakin besar pula *reward* yang diterima individu tersebut.
6. Mendorong *ukhuwah* antar sesama pelaku ekonomi. Persaingan yang terdapat dalam ekonomi Islam bukanlah persaingan yang harus saling mematikan, namun persaingan yang tetap menjunjung tinggi prinsip dan aturan syariat.
7. Menghormati hak milik individu. Tidak boleh seorang produsen muslim mengambil hak milik individu secara paksa.
8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/transaksi.
9. Adil dalam bertransaksi, tidak boleh ada eksploitasi dalam ekonomi Islam. Kedua belah pihak harus berada pada posisi yang seimbang.
10. Memiliki wawasan sosial, harus ada dana yang dialokasikan bagi keperluan sosial dan dijalan Allah.
11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak, tidak boleh mengeksploitasi hak- hak karyawan. Sebab dalam Islam diharuskan membayar hak karyawan sebelum keringatnya kering.

12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam, meskipun produksi barang yang diharamkan dalam Islam mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi.³⁵

7. Produksi dalam *Maqasid Al Syari'ah*

Secara etimologis, *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman, dan kesejahteraan. Adapun masalah adalah kemanfaatan atau kebaikan.³⁶ Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu, kebutuhan *Dharuriyyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *Tahsiniiyyat*.

1. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Jenis *Maqasid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok ini akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata diakhirat kelak.³⁷

Dharuriyat terbagi menjadi lima poin, *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu :

1. Penjagaan terhadap agama (*hifz al-Din*);
2. Penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

³⁵ *Ibid.*, hal. 162.

³⁶ Ahmad Dakhoir, *Pengaturan & Integrasi kelembagaan Pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015 hal. 31.

³⁷ Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005 hal. 382.

3. Penjagaan terhadap akal (*hifz{ al- aql*);
 4. Penjagaan terhadap keturunan (*hifz{ al- nasl*); dan
 5. Penjagaan terhadap harta benda (*hifz{ al- mal*).
2. Kebutuhan *h}ajiyyat*

Kebutuhan *h}ajiyyat* merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya *rukshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

3. Kebutuhan *Tah}siniyyat*

Tujuan jenis *maqa<sid* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurkan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai penerang, pelengkap, dan penghias kehidupan manusia.³⁸

Dalam Islam, seharusnya hal inilah yang menjadi alasan bagi pelaku industri, ketika ingin memproduksi suatu barang/ jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.³⁹ Memproduksi sektor *d}aruriyyat* harus lebih didahulukan dari pada sektor *h}ajiyyat* dan *Tah}siniyyat*. Jikalau kebutuhan *Tah}siniyyat* lebih tercukupi dari pada *d}aruriyyat*, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini beseberangan dengan tujuan

³⁸ *Ibid.*, hal. 383.

³⁹ Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al- Syariah*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 114.

Maqasid al-syari'ah, yaitu perwujudan kemaslahatan di antara manusia.⁴⁰

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi : pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad, jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Karena pada dasarnya, pekerjaan duniawi tidak hanya bermanfaat bagi individu pelakunya, tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Seorang muslim diminta bekerja untuk akhiratnya. Dan bekerja didunia adalah kewajiban bagi seorang muslim.⁴¹

8. *Fiqh Al-Bi'ah* dalam Menghindari Negative Externalities

Fiqh Al-Bi'ah (Fikih lingkungan) adalah merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Fikih lingkungan adalah fikih yang berisi regulasi atau norma-norma yang mengatur aksi-aksi dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Memperkuat kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 115.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 117.

lingkungan dan pemecahan-pemecahan akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia.⁴²

Dalam mengupayakan keuntungan, ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika memproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, ataupun dampak merugikan akibat adanya proses produksi. Dampak tersebut kerap kali menimpa sekelompok masyarakat yang tidak berhubungan dengan aktivitas produksi, baik sebagai konsumen, distributor, produsen, maupun menjadi bagian dari faktor industri itu sendiri. Eksternalitas bisa berupa limbah perusahaan yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah sekitar lingkungan pabrik.⁴³

Eksplorasi sumber daya alam besar-besaran tanpa memperhatikan *carrying capacity* dan keberlangsungan sumber daya alam tersebut menyebabkan menurunnya ketersediaan dimasa depan atau mengeksploitasi sumber daya alam secara merusak yang pada akhirnya dirasakan oleh mereka sendiri sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi; Allah menghendaki agar mereka

⁴² Busriyanti, *Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqih Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Fakultas Syariah IAIN Jember, Fenomena, Vol 15 No. 2 Oktober 2016 hal. 259.

⁴³ *Ibid.*

merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”⁴⁴

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya konsep *Tauhid* adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara langsung bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa *syukur* atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil ‘a>lami>n* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi *tauhid*, *syukr*, *khalifatullah*, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari *amanat* dan sikap *ihsan*. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan di mintakan pertanggung jawaban kelak di akhirat.⁴⁵

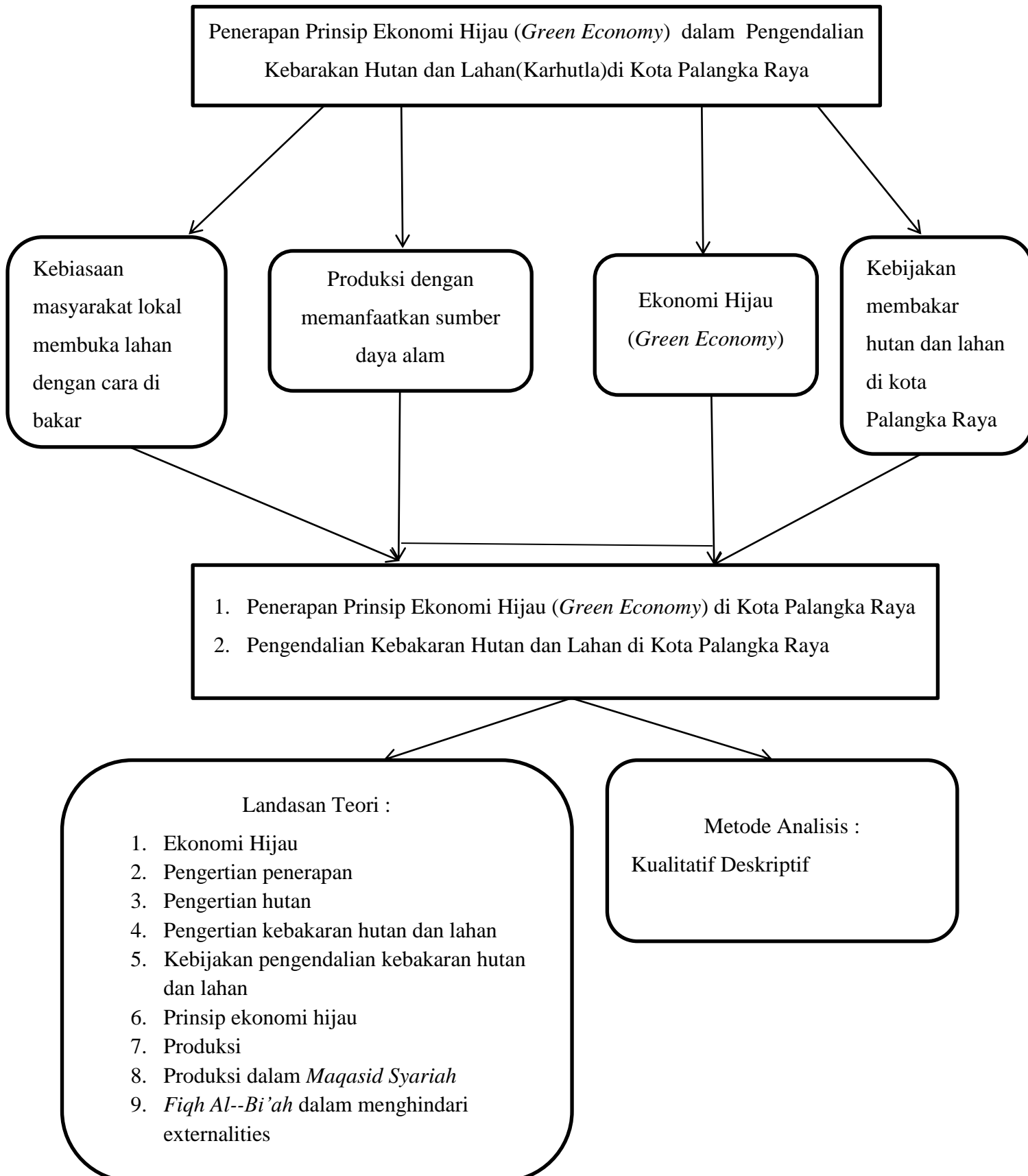
⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* PT. Sinergi Pustaka Indonesia. hal. 576

⁴⁵ Busriyanti, *Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqih Al-Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perfektif Maqashid Al- Syari’ah*. . . 259.

C. Kerangka Pikir

Pemerintah kita telah membuat banyak kebijakan-kebijakan mengenai pembakaran lahan dan hutan baik itu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berisi tentang lingkungan hidup kehutanan maupun pembakaran lahan. Semua itu dibuat untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Namun, apakah prinsip-prinsip ekonomi hijau telah menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tersebut, mengingat prinsip ekonomi hijau yang penting untuk diterapkan. Berdasarkan itu penulis ingin melihat bagaimana penerapan prinsip ekonomi hijau di kota Palangka Raya dan bagaimana pengendalian karhutla di kota Palangka Raya. Berikut skematis kerangka pikir dari judul proposal ini.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian adalah dua bulan terhitung setelah mendapat ijin resmi dari IAIN Palangka Raya untuk menggali, menganalisis serta mengumpulkan data-data dan fakta berupa informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek dan objek pada penelitian ini sehingga dihasilkan data yang objektif dan valid. Namun, jika dalam waktu dua bulan ini data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi untuk dianalisis.

Adapun untuk meneliti ini tempatnya di Dinas Kehutanan Kota Palangka Raya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini penelitian kualitatif maka menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁶ Menurut Nasir penelitian deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau

⁴⁶ Lexy. J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Ofiset, 2001. Hal. 3.

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.⁴⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf dekskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas data faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan.⁴⁸

Melalui penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dapat dihimpun data sewajarnya terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dan diharapkan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Dalam Pengendalian Karhutla di kota Palangka Raya.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak ACP dan Bapak AZ yang bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Bapak AP yang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ditambah dengan satu informan yaitu Bapak SR sebagai data penunjang atau data

⁴⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999 hal, 63.

⁴⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2007, hal. 6.

sekunder. Tujuan penggunaan Informan tambahan agar penggalan data dapat dilakukan dengan maksimal.

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁹ Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Dalam Pengendalian Karhutla di Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰ Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide yang melalui tanya jawab secara langsung dengan responden atau mendengarkan langsung tentang informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

Peneliti terjun langsung kelapangan untuk mewawancarai subjek, guna untuk mengumpulkan data tentang masalah-masalah yang

⁴⁹ Nasution, *Research (penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004 hal. 68.

⁵⁰ Lexy. J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,... Hal. 135.

berhubungan dengan peneliti. Melalui teknik ini, data yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Di kota Palangka Raya.
- b. Bagaimana Pengendalian Karhutla Di kota Palangka Raya ?

2. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala piskis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵¹ Maka peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka serta mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari suatu data sumber berupa tulisan, gambar, catatan, buku, yang mengenai masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.⁵²

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... hal. 135.

⁵² *Ibid.*, hal. 179.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data merupakan suatu upaya dilakukan untuk menjamin agar semua data yang diperoleh dan diteliti sesuai dengan apa yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara dan menjamin agar data yang berhasil dihimpun itu benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi untuk menjamin bahwa data yang terhimpun benar dan valid, akan diperlukan pengujian terhadap sumber data dengan teknik (triangulasi). Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵³

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah teknik pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda metode kualitatif. Hal ini dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁵³ *Ibid.*, hal. 78.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun kegunaan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.⁵⁴ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut :

1. *Data Collection*, yaitu pengumpulan data yang peneliti lakukan dari berbagai sumber berkaitan dengan data yang diperlukan sebanyak mungkin yang memiliki hubungan dengan penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. *Data Reduction*, yaitu pengurangan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.
3. *Data Display*, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian dipaparkan oleh peneliti secara ilmiah dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. *Conclusion Drawing/Verifying*, yaitu penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisis.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, Hal. 177.

⁵⁵ Matthew B. Milles Dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta :UI-Press, 1992, hal. 16.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran tentang Kota Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Gambaran Tentang Kota Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1595 yang menerapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah menjadi 5 kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.

Kota Palangka Raya adalah Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 6° 40' - 7° 20' Bujur Timur dan 1° 30' - 2° 30' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 desa/kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :⁵⁶

Sebelah utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur : Kabupaten Kapuas

⁵⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, 2010, hal. 3.

Sebelah selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2,678,51 km² (267.851 Ha) di bagi kedalam 5 kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117, 25 km² , 583,50 km² , 572,00 km² 1.053,14 km². Luas wilayah sebesar 2,678, 51 km². Dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan : 2.485, 75 km²
- b. Tanah pertanian : 12,65 km²
- c. Perkampungan : 45, 54 km²
- d. Areal Perkebunan : 22,30 km²
- e. Sungai dan danau : 42, 86 km²
- f. Lain-lain : 69,41 km².⁵⁷

Sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah mempunyai kawasan hutan seluas 10.294.388, 72 ha atau 64% dari total luas wilayahnya. Hutan-hutan Tropika seluas 10.350.363,87 ha atau 65,51% dari total luas provinsi; hutan rawa tropika seluas 2.383.683,31 ha atau 15,08% dari total luas provinsi; hutan rawa gambut seluas 2.280.789.,70 ha atau 14,44 % dari total luas provinsi; dan hutan pantai mangrove seluas 832.573,55 ha atau 5,27% dari total luas provinsi.⁵⁸

Tabel 2. Luas wilayah kawasan hutan berdasarkan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Suwandi, *Statistik Potensi Sumber Daya Alam Indonesia*, Jakarta:Puspa Swara, 2013 hal. 81.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah⁵⁹

Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
Kawasan Hutan Lindung	
1. Hutan Lindung (HL)	1.391.604
2. Hutan Adat (HA)	600.000
3. Suaka Margasatwa (SM)	57.389
4. Cagar Alam (CA)	198.597
5. Taman Nasional (TN)	1.168.284
6. Taman Wisata Alam (TWA)	2.954
7. Taman Hutan Raya (Tahura)	35.627
8. Kawasan Suaka Alam san Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Eks. PLG	154.002
9. Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH)	17.626
10. Kawasan Reservaat	23
11. Kawasan Lindung Lainnya	4.036
Jumlah A	3.630.142
Kawasan Budi Daya	
1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571
2. Hutan Produksi (HP)	3.896.706
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	2.258.274
4. Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779
Jumlah B	12.120.330
Jumlah A+B	15.750.472

⁵⁹ *Ibid.*

2. Gambaran Dinas Kehutanan Kota Palangka Raya

Dinas kehutanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas kehutanan dipimpin oleh kepala dinas. Dinas kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi dinas kehutanan yaitu :⁶⁰

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
- e. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- f. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.

Adapun alamat Dinas kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di Jalan Imam Bonjol No. 1; nomor telepon 3221834-3236544; fax. 3221656-3221192 kota; kotak pos 93.

⁶⁰ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, *Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah*. Hal. 2-4.

3. Gambaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas untuk menanggulangi bencana yang terjadi baik di provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpegang pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, sebenarnya BPBD bertugas untuk menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat kabupaten atau kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005.⁶¹

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan tengah yaitu : *“Terselenggaranya pencegahan bencana berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanggulangan bencana yang cepat, tepat, adil, transparan, dan akuntabel melalui pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat.”*

Sebagai perwujudan dan implementasi dari Visi dirumuskanlah kedalam misi BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

⁶¹ <https://profil.merdeka.com/indonesia/b/badan-penanggulangan-bencana-daerah/>

3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.⁶²

B. Pemaparan Data Tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Dalam Pengendalian Karhutla Di Kota Palangka Raya

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti temukan terkait penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian karhutla di kota Palangka Raya. Berikut adalah pemaparan data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tiga subyek dan 3 informan yang terdiri dua subyek dan di Dinas Kehutanan dan 1 subyek di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 3 informan dari masyarakat bertani.

⁶² Bpbdkalteng, http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=2208 (diakses pada hari Jum'at tanggal 28 september 2017 pada pukul 09.10 WIB).

1. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Di Kota Palangka Raya

Penerapan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok dalam menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari dari situasi yang baru dan menyangkut penggunaan suatu aturan prinsip.⁶³

Prinsip sendiri merupakan suatu asas kebenaran yang menjadikan pokok dasar berpikir, dan bertindak. Adapun sepuluh Prinsip ekonomi hijau (*green economy*) yaitu prinsip mengutamakan nilai guna, mengikuti aliran alam, sampah adalah makanan, rapih dan keanekaragaman fungsi, skala tepat guna/skala keterkaitan, keanekaragaman, kemampuan diri, partisipasi, kreativitas, dan peran strategis dalam lingkungan buatan.⁶⁴

Prinsip ekonomi hijau(*Green Economy*) adalah prinsip yang harus di pegang dalam menjalankan kegiatan ekonomi hijau, yaitu ekonomi yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial, agar mendapatkan lingkungan yang sehat dan berjangka panjang.

Maksud dari pertanyaan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di kota Palangka Raya, dari satu rumusan masalah diatas peneliti membuat pecahan pertanyaan yang terdiri dari empat pertanyaan yang akan diajukan untuk para subjek yaitu: bagaimana kebijakan pembakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya, bagaimana penerapan kebijakan tersebut,

⁶³ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*. . . hal. 35.

⁶⁴ Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, . . . hal. 201-204

bagaimana pelarangan membakar bagi masyarakat yang terbiasa membuka lahan dengan cara dibakar, dan apakah dalam pembuatan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kaitkan dengan ekonomi hijau. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan dua subjek yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

- a. Subjek pertama adalah Bapak ACP yang merupakan lulusan S1 Manajemen kehutanan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992) dan lulusan S2 Ilmu kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda (2003). Subjek merupakan instruktur teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan dinas kehutanan Prov. Kalimantan Tengah pada tahun 2003-2017, koordinator lapangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dinas kehutanan Prov.Kalimantan Tengah pada tahun 2004-2006. Sekarang subjek ACP berada pada sub bagian penyusunan program yaitu sebagai kepala sub bagian penyusunan program. Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan Bapak ACP di dinas kehutanan kota Palangka Raya pada hari Senin, 25 september 2017 pukul 09.30 -11.15 WIB. Berikut hasil wawancara dengan Bapak ACP tentang penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di kota Palangka Raya.

Penuturan Subjek I Bapak ACP :

“Kebijakan itu yang pertama kita lihat gitu ya ke belakang, maksudnya kebakaran yang paling parah-parah itukan mulai tahun 97 kemudian 2002 kemudian 2006 , 2010, dan 2015 polanya itu

sekitar 5 tahunan kira-kira karena pengaruh iklim dampak el nino. Nah, melihat kejadian kebakaran sejak tahun 97 yang parah itu pemerintah sudah mengambil kebijakan, beberapa kebijakan yang terpentingnya adalah membuat Perda (Peraturan Daerah). Sebelumnya di pemerintah pusat juga sudah ada yang namanya undang-undang lingkungan hidup, kemudian ada juga yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang kebakaran. Kalteng sendiri ada yang namanya Perda nomor 5 tahun 2003 itu kan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, gubernur bersama dengan DPRD ya kan. Kemudian juga dilakukan membuat peraturan gubernurnya yang mengatur ada yang larangan membakar totalnya ada mutlak tidak boleh. Pada saat tertentu waktu itu masih diperbolehkan pembakaran untuk pertanian tapi sangat terbatas ber ijin semuanya adalah tujuannya untuk mengatur supaya kejadian itu tidak berulang.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek Bapak ACP menyatakan pemerintah sudah mengambil tindakan kebijakan terkait pembakaran hutan dan lahan berdasarkan kebakaran parah yang terjadi pada tahun 1997, 2002, 2006, 2010, dan 2015 yang berpola setiap 5 tahunan disebabkan oleh iklim dampak El nino. Sebelumnya pemerintah pusat telah ada Undang-Undang lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Kemudian di Kalimantan Tengah sendiri terdapat Perda Nomor 05 tahun 2003 yaitu tentang pengendalian kebakaran hutan atau lahan, dan peraturan gubernur yang mengatur pelarangan total membakarnya. Namun pembakaran masih diperbolehkan pada waktu tertentu, pembakaran untuk

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak ACP pada hari Senin 25 September 2017

pertanian terbatas, dan ber ijin. Semua aturan kebijakan yang dibuat bertujuan agar kejadian kebakaran parah yang pernah terjadi tidak terulang kembali dan dapat diatasi.

Kemudian pertanyaan kedua bagaimana penerapan kebijakan tersebut. Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek I Bapak ACP :

“ Jadi penerapannya adalah pemerintah mengawasi itu pelaksanaan Undang-Undang dan juga Perda itu, kalo masyarakat tertib melaksanakannya ya mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran, kalo masih terjadi lagi ya pemerintah berupaya mengendalikan, memadamkan dan segala macam. Mencegah terutama kan, sekarang gubernur mencanangkan pencegahan lebih utama dan walikota juga pencegahan lebih utama, kemudian adalagi satu kebijakannya yaitu, apel siaga namanya. Kalo sudah situasinya kemarau gitu udah mulai gawat maka dilaksanakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi ada, dan di kab kota juga ada. Kemudian sosialisasi selalu sudah rutin, yang namanya bencana kebakaran hutan dan lahan itu agendanya sudah tahunan. Ini berjalan terus makanya ia bagian dari kebijakan program lingkungan hijau itu. Tidak sama dengan penanggulangan BPK badan pemadam kebakaran, berbeda. Kita ada maupun tidak ada kebakaran jalan terus. Apabila tidak ada berarti mencegah dengan penanaman tanah-tanah kosong. Tapi kalo menjelang kemarau sudah kita melakukan kesiapsiagaan.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek Bapak ACP menyatakan bahwa penerapan kebijakan yang pemerintah lakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan juga Peraturan Daerah yang ada. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang bahaya kebakaran, pengendalian dan pemadaman jika terjadi kebakaran. Pada saat memasuki musim kemarau pemerintah melaksanakan Apel

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak ACP pada hari Senin 25 September 2017

kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Penerapan kebijakan ini rutin dilakukan setiap tahun mengingat bencana kebakaran hutan dan lahan agendanya sudah tahunan. Sekarang Gubernur dan Walikota Kalimantan Tengah mencanangkan pencegahan lebih utama dilakukan dibanding penanganan.

Kemudian pertanyaan ke tiga bagaimana pelarangan membakar bagi masyarakat yang terbiasa membuka lahan dengan cara bakar. Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek I Bapak ACP :

“ Pada saat tertentu waktu itu masih di perbolehkan pembakaran untuk pertanian tapi sangat terbatas ber ijin semuanya adalah tujuannya untuk mengatur supaya kejadian kebakaran yang parah tidak berulang. Sementara masyarakat juga harus dipenuhi kadang-kadang kan ada pertanian perlu bikin kompos bikin abu yang diambil, itu yang diatur namanya pembakaran terkendali itu, tapi kedepan yang diarahkan adalah pembukaan lahan untuk pertanian itu tanpa bakar. Namanya PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar). Pokoknya semua pertanian di Kalimantan Tengah termasuk juga di kota Palangka Raya, diarahkan kesitu, pemerintah juga telah memberikan program cetak lahan bagi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Yang berbahaya gini ada lahan-lahan kosong ada yang memiliki tapi tidak diurus ya itu yang terbakar itu yang bahaya, itu adalah pelanggaran. Karena semua orang yang punya lahan termasuk harus bertanggung jawab untuk lahannya sendiri-sendiri kalo ada kebakaran dilahannya dia bisa ditangkap berdasarkan Perda itu, berdasarkan Undang-undang lingkungan hidup, dan Undang-undang kehutanan juga itu pemerintah sudah mengupayakan.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Bapak ACP bahwa pada saat waktu tertentu pembakaran lahan untuk pertanian masih di perbolehkan tetapi sangat terbatas dan ber ijin. Tujuannya agar supaya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak ACP pada hari Senin 25 September 2017.

kejadian kebakaran yang parah tidak berulang. Pertanian masyarakat yang memerlukan abu untuk kompos harus dipenuhi caranya dengan melakukan pembakaran terkendali, namun kedepannya masyarakat akan diarahkan pada pembukaan lahan tanpa bakar yaitu PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar). Semua pertanian di Kalimantan Tengah termasuk kota Palangka Raya diarahkan ke PLTB yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau yaitu kreativitas dan pengembangan masyarakat dimana dalam melakukan perubahan hijau diperlukan pribadi dan politik sampai sosial dan ekologi berjalan seiringan. Kemudian masyarakat yang mempunyai lahan kosong namun tidak diurus yang berakibat tumbuhnya rerumputan lebat yang apabila musim kemarau itu rawan akan kebakaran. Jika terjadi kebakaran lahan tersebut maka ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah yang mana pemilik lahan harus bertanggung jawab dengan menjaga lahan kosong miliknya. Melalui Undang-undang lingkungan hidup, dan undang-undang kehutanan pemerintah sudah mengupayakan pencegahan atas kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi.

Kemudian pertanyaan keempat apakah dalam pembuatan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kaitkan dengan ekonomi hijau(*green economy*). Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek I Bapak ACP :

“Memang pembangunan yang kebelakang ini Bappenas juga mencanangkan itu ekonomi *government* termasuk yang *government* yang bewawasan lingkungan memang arahnya kesitu maka salah satu yang di Perda atau yang peraturan-peraturan itu

semua diarahkan semua agar kemungkinan menyempit *illegal logging* karena ia berwawasan lingkungan arahnya memang kesana.’’⁶⁸

Berdasarkan dari penuturan Bapak ACP bahwa Bappenas telah mencanangkan ekonomi *government* yaitu *government* yang berwawasan lingkungan yang arahnya memang ke ekonomi hijau yang salah satu peraturan yang di Perda mengarah kepada menyempitnya *illegal logging* karena ia berwawasan lingkungan.

- b. Subjek kedua adalah Bapak AZ yang merupakan lulusan S1 Fakultas kehutanan Institut Pertanian, Malang (1989) dan lulusan S2 Ilmu kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda (2003). Subjek merupakan kepala Daerah Operasi Brigdalkarhut Manggala Agni Kementerian Kehutanan di Palangka Raya pada tahun 2004-2012, dan Instruktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan dinas kehutanan Prov.Kalimantan Tengah pada tahun 2004-2017. Sekarang subjek AZ berada pada sub bagian penyusunan program yaitu sebagai penyusun verifikasi anggaran APBN dan LAKIP. Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan Bapak AZ di dinas kehutanan kota Palangka Raya pada hari Senin, 25 september 2017 pukul 09.30 -11.15 WIB. Berikut hasil wawancara dengan Bapak AZ tentang penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di kota Palangka Raya.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak ACP pada hari Senin 25 September 2017.

Penuturan Subjek II Bapak AZ :

“ Terkait kebijakan pemerintah bagaimana supaya itu kebakaran tidak terulang ulang terus maka melalui kebijakan. Kebijakannya pertama pemerintah membuat Undang-undang tentang kehutanan, tentang lingkungan hidup. Bisa dilihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup nah, Undang-Undang inikan global dijabarkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah lebih spesifik, nanti dijabarkan lagi melalui institusi kementerian-kementerian misalnya kehutanan dijabarkan oleh menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Yang terakhir Nomor 32 tahun 2016 itu dikebijakan pusat. Di daerah kewenangan tertinggi kan ada gubernur ya, jadi harus ada peraturan daerahnya. Undang undang tadi yang besar tadi itu ditingkat pusat dijabarkan dibagi jadi peraturan pemerintah dan peraturan menteri kalo di daerah Undang-Undangnya dijabarkan melalui peraturan daerah sama peraturan gubernur nah dua-duanya sudah dibuat di pemerintah Kalteng ini. Perda tadi sudah disebutkan Pak ACP sementara sudah ada sedang di revisi Perdanya sudah ada yaitu perda nomor 5 tahun 2003 sudah bagus perdanya tetapi implementasi di lapangannya ada hal yang perlu diperbaiki. Kemudian peraturan gubernur menjelaskan tentang perda tadi itu dijalankan juga tetapi sedang direvisi juga, saat ini tahun 2017 akan dilakukan revisi. Tetapi pemerintah secara kebijakan sudah membuat aturan- aturan dari tingkat atas sampai bawah. Nanti disampaikan jadi kebijakan pertama adalah peraturan perundangan yang implementasinya tadi kalo berkaitan dengan kebakaran baik itu Undang-Undang sampe PP, PER MEN HUT, PERDA, sama PERGUB itu mengatakan bahwa membasmi kebakaran itu ada tiga yaitu pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas subjek Bapak AZ menjelaskan bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan agar kebakaran tidak terulang terus-menerus pemerintah telah membuat kebijakan dalam membuat aturan. Kebijakan yang pertama, pemerintah membuat Undang-Undang tentang kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Undang-Undang tentang lingkungan hidup Nomor 32

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AZ pada hari Senin 25 September 2017.

tahun 2009. Kedua Undang-Undang tersebut masih global bersifat umum untuk itu maka di jabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atas pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atas lahan. Setelah dijabarkan Peraturan Pemerintah kemudian di jelaskan kembali melalui Institusi kementerian pada bidangnya. Seperti pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terdapat pada Nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di daerah Undang-undang yang bersifat umum dijabarkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah yang ada di Kalimantan Tengah terdapat pada nomor 05 tahun 2003 tentang pengendalian hutan dan lahan. Kemudian Perda tadi di perjelas kembali oleh Peraturan Gubernur. Terkait Perda dan Pergub di Kalimantan Tengah ini sedang dalam tahap revisi. Pada kebijakan kebakaran hutan dan lahan yang ada mengatakan bahwa membasmi kebakaran hutan dan lahan itu terdapat tiga tahap yaitu, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.

Kemudian pertanyaan kedua bagaimana penerapan kebijakan tersebut. Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek II Bapak AZ :

“Penerapan kebijakannya yaitu dengan penyadartahuan, sosialisasi peraturan perundang-undangannya, jadi upaya pencegahan ini pemahaman semua. Misalnya saya dan pak agung nggak mungkin kami membakarliah 100% dikatakan tidak membakar karena kami tau dampaknya. Nah supaya orang lain itu sama seperti saya dan

pak agung apa ? ya diajarin supaya ada pengetahuan. Adakan mengalami tahun 2015, susah kan ? orang pasti akan sadar bahwa pembakaran mempunyai dampak yang sangat besar. Yang pertama kali adalah penyadartahuan masyarakat tentang ancaman bahaya kebakaran dampaknya dirasakan merugikan macam-macam tuh. Implementasinya ya tentunya semua itu kan tidak cukup hanya peraturan perundangan, pemerintah harus menyediakan anggaran. Harus menyediakan sarana dan prasarananya, dan meningkatkan kapasitas orangnya, percuma dibelikan alat-alat pemadam kebakaran kalo nggak dilatih madamkan kan nggak bisa ya kan. Jadi menyamakan persepsi bahwa ancaman kebakaran itu bahaya, dan perlu di minimalisir. Salah satunya adalah apel siaga yaitu supaya menyamakan persepsi agar semua mengetahui ancaman bahaya kebakaran dan adanya kesiapsiagaan jika terjadi kebakaran.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas subjek Bapak AZ menyatakan bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan penyadartahuan, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan agar masyarakat tau bahaya kebakaran hutan dan lahan serta tau hukum membakar hutan dan lahan itu sendiri. Dengan masyarakat tahu ancaman bahaya kebakaran yang terjadi diharapkan dapat menumbuhkan rasa kehati-hatian dan peduli masyarakat sehingga dapat mengurangi dan menimalisir kebakaran yang dapat terjadi. Dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya peraturan perundangan yang disosialisasikan tetapi juga tersedianya anggaran, serta sarana prasarana dari pemerintah dan peningkatan sumber daya manusianya agar dapat terlaksana dengan baik.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak AZ pada hari Senin 25 September 2017.

Kemudian pertanyaan ke tiga bagaimana pelarangan membakar bagi masyarakat yang terbiasa membuka lahan dengan cara bakar.

Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek II Bapak AZ :

“ Sebenarnya begini, diperaturan gubernur itu sudah bagus ya mengatur melalui izin RT desa sudah bagus. Kalo itu dijalankan tidak akan terjadi kebakaran tetapi masalahnya masyarakat ini nggak siap, karena ada oknum yang membakar lahan sembarangan, tidak dijaga dan di ini. Nah ini mau diperbaiki, mau direvisi kayak apa sih baiknya. Nah membakar itu kan bukan sepanjang tahun tidak boleh membakar, jadi kalo kita ini manajemen kebakaran itu ada manajemen bulan, manajemen siaga. Jadi ada waktunya musim hujan dan musim kemarau. Ada siaga 1, 2 ke 3 ya. Jadi normal siaga 3 dalam kondisi normal, agak mulai musim kemarau jadi siaga 2 membakar-membakar mulai dibatasi, nah yang tidak boleh tadi di siaga 1 yaitu pada musim kemarau yang terjadi kebakaran. Coba sekarang pas musim kemarau tidak ada air dan ada yang membakar, pasti kebakaran kan ?. nah jadi kalo mau membakar jangan pas musim kemarau siaga 1 itu. Nah sekarang masalahnya kalo bareng-bareng takutnya tidak terkendali, kalo misalnya dengan sangat terpaksa memang harus membakar itu diatur benerbener pak RT pak RW, si A hari ini ya membakarnya dijaga luasnya berapa jangan sampai melompat api ini ini ini segera dipadamkan. Besok si ini, si A disini, si B disini kalo berbarengan namun tidak berjejeran bisa aja di atur itu. Jangan dimusim kemarau. Jadi gini lo Sepanjang itu tidak membakar sembarangan, semua itu kan ada pertimbangannya kebijakannya, sepanjang tidak membahayakan yang bisa merembet dan tidak dapat dikendalikan. Buat kami, kalo saya sih ya nggak masalah. Misalnya saya punya tanah seluas ini saya bakar saya jaga saya jamin api tidak melompat ya tidak apa-apa asal jangan disiaga 1 tadi disaat musim-musim kemarau disaat musim-musim kebakaran, oh udah pasti ditangkap itu, karena apa pasti api itu merembet karena ini semua, coba sekarang ini membakar disini, disini dalam kondisi kering pasti merembet disini. Salah satu yang menjadi perhatian di kalteng ini beda dengan tempat lain karena lahan gambut, kayak sekam kalo dibakar apinya nggak ada, adanya asap. Makanya dikalteng ini bencananya bukan bencana api, tapi bencana asap. Kalo disini itu nggak akan ada habisnya karena apinya masuk kedalam tanah, dan kenapa disini super ketat dilarang membakar ? karena disini itu gambut, gambut sulit di jaga kalo sudah terbakar, merembet-rembet kayak sekam. Nah itu juga harus diwaspadai. Karena gambut bukan

material bakaran kayak yang kering-kering sekali bakar habis, kalo gambutkan nggak, jadi itu yang menjadi perhatian. sehingga harus bener-bener diatur dan dijaga. Pengalamn yg sudah-sudah, jarang orang mau menjaga lahannya karena apa ? karena terlalu luas sulit di jaga. Peraturannya Kalo bener kita mau membakar itukan kita harus bikin sekat bakar, bikin parit dibersihkan, misalkan di bakar tidak merembet makanya harus di bersihkan dulu. Ya di Palangka inikan karakteristiknya terutama dilahan gambut itu beda, memang mencegah pelarangan memakar itu harus. Takutnya di salah gunakan tidak terkontrol. Bukan hanya melarang, pemerintah mengkhawatirkan, karena kita sudah bisa membayangkan bahwa nanti api sulit di kendallikan dan di kontrol, sehingga lebih bagus dilarang aja sudah. Sehingga perlu upaya-upaya lain, banyak macem-macem upaya supaya tidak membakar itu, ada Pembukaan Lahan Tanpa Bakar(PLTB). Pemerintah pun memberikan bantuan program cetak lahan bagi kelompok tani agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lagi dan tidak melakukan pertanian lahan berpindah. Jadi ada perlu dikembangkan pembukaan lahan tanpa bakar untuk pertaniannya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Bapak AZ bahwa Peraturan Gubernur yang ada sudah bagus dengan mengatur pembakaran lahan melalui ijin RT setempat. Peraturan tersebut jika dijalankan dengan baik maka tidak akan terjadi kebakaran yang parah, namun masyarakat belum siap sehingga masih ada oknum yang membakar lahan sembarangan dan tidak melakukan penjagaan pada lahannya. Sekarang Pergub ini sedang dalam tahap revisi agar dapat sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang. Larangan membakar sebenarnya bukan sepanjang tahun tidak boleh membakar. Di Dinas kehutanan terdapat manajemen kebakaran yang disebut dengan manajemen bulan, manajemen siaga. Jadi ada dua waktu musim hujan dan musim kemarau. Siaga yang ada yaitu siaga 1, 2 , dan 3. Siaga 3

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak AZ pada hari Senin 25 September 2017.

merupakan kondisi normal yang belum berbahaya, siaga 2 mulai memasuki musim kemarau yang artinya membakar mulai dibatasi, dan siaga 1 sudah masuk pada musim kemarau yang artinya sudah tidak diperbolehkan melakukan pembakaran. Masyarakat yang memang harus terpaksa membakar maka harus diatur dan bekerjasama dengan RT/RW, dengan melakukan manajemen waktu dan tempat juga tidak dilakukan pada saat musim kemarau. Sepanjang tidak membakar sembarangan, pembakaran itu ada pertimbangan kebijakannya, sepanjang tidak berbahaya yang bisa merembet dan tidak dapat dikendalikan. Di Kalteng yang menjadi perhatian adalah karena lahan tanah yang ada merupakan lahan gambut yang apabila terbakar apinya tidak ada namun asap yang keluar. Karena di Kalteng ini bukan bencana api tetapi bencana asap. Gambut sendiri sulit dijaga jika sudah terbakar. Gambut bukanlah material bakaran kering yang sekali bakar habis namun gambut apinya masuk kedalam tanah sehingga susah dikendalikan. Pengalaman yang sering terjadi, sedikit masyarakat yang mau menjaga lahan mereka karena terlalu luas. Aturan dalam melakukan pembakaran itu ada yaitu dengan membuat sekat bakar, dan parit dibersihkan agar api tidak merembet. Karena beberapa hal tadi maka pelarangan membakar lahan itu harus, karena takut disalah gunakan dan tidak terkontrol. Dan dalam pelarangan ini diperlukan upaya-upaya lain yaitu dengan diadakannya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), dalam pelaksanaannya pemerintah juga

memberikan program cetak lahan pada petani agar meminimalisir terjadinya pembakaran lahan.

Kemudian pertanyaan keempat apakah dalam pembuatan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kaitkan dengan ekonomi hijau(*green economy*). Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek II Bapak AZ :

“Tentang ekonomi hijau salah satunya kan bagaimana supaya lingkungan ini kan tidak berubah dalam artian dari sisi kehutanan kan secara ekologi nya bagus, kalo di Kalimantan tengah inikan banyak hutan, kawasan hutan dan hutan kita ini luas sekali. Benar saja kalo kita ini misalnya pembangunan hijau karena apa kita mempertahankan lingkungan hijau. Salah satu cara kita mempertahankan ini adalah mencegah dari bahaya kebakaran ya, karena bahaya kebakaran hutan itu adalah bisa dibilang itu adalah hal yang paling ditakutkan orang ekologi kira-kira begitu. Karena jika sudah terbakar semua musnah habis keanekaragaman hayati dan sebagainya, dalam pembuatan kebijakannya sedikit banyak menyangkut akan lingkungan ekologi yang juga termasuk ekonomi hijau.”

Berdasarkan penuturan Bapak AZ bahwa di Kalimantan Tengah ini banyak sekali hutan, merupakan kawasan hutan yang luas benar saja jika ini merupakan pembangunan hijau karena kita mempertahankan lingkungan hijau. Salah satu cara mempertahankan itu adalah dengan mencegah akan bahaya kebakaran. Dengan mencegah bahaya kebakaran akan menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di hutan. Dan dalam pembuatan kebijakannya sedikit banyak menyangkut dengan lingkungan ekologi yang termasuk dalam ekonomi hijau.

- c. Instrumen satu adalah Bapak SR berumur 31 tahun. Beliau merupakan seorang petani yang sudah bertani selama 5 tahun. Berikut hasil penuturan bapak SR tentang apakah ada larangan pembakaran hutan dari pemerintah.

Penuturan Informan I Bapak SR :

“Larangan pembakaran lahan memang ada, bapak taunya dari sosialisasi dan spanduk-spanduk yang di pasang sekitar jalanan. Dulu masih diperbolehkan membakar lahan, tapi sekarang polisi sering terlihat dan katanya tidak boleh membakar lagi.”

Berdasarkan penuturan dari bapak SR bahwa larangan pembakaran lahan ada, beliau mengetahui itu melalui sosialisasi dan spanduk-spanduk yang di pasang. Beliau berkata bahwa dulu pernah ada di perbolehkan pembakaran lahan untuk pertanian, namun sekarang sudah di larang tidak diperbolehkan membakar lahan.

Kemudian pertanyaan kedua apakah ada sangsi dari pelarangan membakar hutan dan lahan. Berikut penuturannya.

Penuturan informan II Bapak SR :

“Bapak kurang paham dengan sangsi itu, namun waktu ada yang tertangkap membakar maka akan di denda dan di ada ancaman penjaranya kalo melakukannya kalo tidak salah.”

Berdasarkan penuturan dari bapak SR bahwa sangsi membakar lahan dan hutan belum diketahui secara betul oleh informan. Informan hanya mengetahui berdasarkan pengalaman bahwa ada yang pernah dikenakan denda dan ancaman penjara jika membakar sembarangan.

Kemudian pertanyaan ketiga apakah ada alternatif yang diberikan pemerintah dari pelarangan membakar hutan dan lahan.

Berikut penuturannya.

Penuturan Informan I bapak SR :

“Ada, kami diberikan fasilitas cetak lahan. Kami membuat proposal lalu di proses di berikan program cetak lahan dan ada di kasih obat hama, dan pupuk juga.”

Berdasarkan penuturan bapak SR bahwa alternatif yang diberikan pemerintah melalui program cetak lahan dengan mengajukan proposal maka dilakukan pembukaan lahan dengan cetak lahan tanpa melakukan pembakaran.

Kemudian pertanyaan keempat bagaimana dampak pelarangan membakar bagi diri sendiri dan lingkungan. Berikut penuturannya.

Penuturan Informan I bapak SR :

“Alhamdulillah selama ini bapak merasakan tidak ada asap lagi, dulu kan pernah sampe cape nafas gara-gara asap. Kalo untuk penghasilan ya agak turun karena biaya untuk bertani lebih banyak di banding dibakar biasanya tanah lebih subur dan nggak perlu perawatan berlebih.”

Berdasarkan penuturan bapak SR bahwa dampak pelarangan membakar yang informan rasakan adalah bahwa dari segi lingkungan informan merasakan lingkungan yang bersih tanpa asap lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Dan untuk penghasilan yang dirasakan memang mengalami penurunan karena biaya dalam bertani yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dulu waktu membakar.

2. Pengendalian Karhutla di Kota Palangka Raya

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Kebakaran hutan sendiri merupakan kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. ⁷²

Maksud dari pertanyaan diatas adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian karhutla di kota Palangka Raya, dari satu rumusan masalah diatas peneliti membuat pecahan pertanyaan yang terdiri dari tiga pertanyaan yang akan diajukan untuk satu subjek yaitu: bagaimana pengendalian karhutla di Kota Palangka Raya, pada bulan apa dimulai antisipasi kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan satu subjek yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

- a. Subjek ketiga adalah Bapak AP yang merupakan lulusan S1 Kehutanan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2002). Subjek bekerja di Dinas kehutanan Prov. Kalimantan Tengah pada tahun 1998 sampai dengan November 2016, dan beliau sekarang bekerja di dinas

⁷² Mea Saputra, <http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 14.40 WIB).

Badan Penanggulangan Bencana Prov.Kalimantan Tengah sejak November 2016 sampai dengan sekarang. Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, penulis dapat melakukan wawancara dengan Bapak AP di dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Tengah pada hari Rabu, 09 Agustus 2017 pukul 09.00 - 09.45 WIB. Berikut hasil wawancara dengan Bapak AP tentang pengendalian karhutla di kota Palangka Raya.

Penuturan Subjek III Bapak AZ :

“Mungkin ini ya yang pertama terkait dengan istilah pengendalian itu biasanya di kehutanan, kalo di kebencanaan artinya kita menggunakan penanggulangan. Tapi dengan kaitannya pengendalian kalo dalam masalah penanggulangan kita ada 3 fase, yaitu fase prabencana kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan nah sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam hal ini sosialisasi, patroli, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian kalau indikasinya sudah mengarah ke potensi lebih besar, maka melalui kesiapsiagaan. Kalo terjadi, kita masuk dalam keadaan darurat, seperti itu ya. Setelah melalui masa darurat, kita memasuki masa pemulihan. Begitu siklusnya kalau di kebencanaan. Tapi intinya dikota itu, mereka sebenarnya sudah punya rencana kontijensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Rencana kontijensi itu adalah rencana yang disusun untuk menghadapi situasi kalo betul-betul terjadi kebakaran, jadi apabila terjadi kebakaran kita sudah punya rencananya. Jadi jangan sampai terjadi kebakaran tapi kita tidak tau berbuat apa. Dari segi pengendalian penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, kalo untuk tingkat provinsi kita lagi menyusunnya (rencana kontijensi) diterapkan supaya bisa punya rencana kontijensi untuk karhutla. Ketiga fase itu yaitu fase pra bencana, kita melakukan penjegahan, litigasi, dan kesiapsiagaan, kemudian klo memang terjadi potensinya benar-benar terjadi kita harus siaga darurat. Yang apabila parah kita akan tanggap darurat, kemudian kalo sudah lewat masa itu kita melakukan reboisasi. Kegiatan-kegiatan pencegahan yaitu pencegahan, sosialisasi, kemudian pemasangan spanduk baliho dan sebagainya. Rambu-rambu pengaman itu adalah bagian dari kegiatan pencegahan. Kemudian sosialisasi, patroli, kita lakukan selama pencegahan. Hampir semua yang

terlibat, yaitu kehutanan mereka punya kegiatan pengendalian yang dimulai juga dari pencegahan, kemudian TNI, POLRI mereka itu luar biasa pencegahannya mereka mendatangi semua rumah-rumah masyarakat yang ada di desa-desa rawan kebakaran, menyampaikan sosialisasi, maklumat-maklumat kapolda agar tidak membakar lahan, kemudian Manggala Agni kehutanan, kemudian kita juga didukung oleh teman-teman relawan, yaitu barisan pemadam kebakaran, tim sumbu api kelurahan, masyarakat peduli api dan semua elemen lah yang terlibat didalamnya.”⁷³

Berdasarkan penuturan dari bapak AP bahwa berkaitan dengan pengendalian dalam masalah penanggulangan kebencanaan terdapat 3 fase yaitu fase prabencana dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan yang sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan-kegiatan pencegahan yaitu dengan sosialisasi, patroli, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apabila kebakaran berpotensi lebih besar maka dilakukan kesiapsiagaan dan jika terjadi kebakaran maka akan masuk kedalam keadaan darurat. Setelah melalui keadaan darurat dilakukan pemulihan yaitu masa pemulihan. Di kota Palangka Raya sendiri telah mempunyai rencana kontijensi yang disusun untuk menghadapi situasi kalau betul-betul terjadi kebakaran. Sedang pada tingkat provinsi rencana kontijensi sedang dalam tahap penyusunan. Banyak yang terlibat dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan ini yaitu TNI, POLRI, Manggala Agni kehutanan dan di dukung juga oleh teman relawan, masyarakat peduli api, dan semua relawan yang terlibat.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak AP pada hari Rabu 09 Agustus 2017.

Kemudian pertanyaan kedua pada bulan apa dimulai antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek III Bapak AP :

“Secara umum periode untuk kita antisipasi kebakaran hutan itu mulai dari bulan 6-10 yaitu biasanya yang kita mulai betul-betul antisipasi. Kayak tahun ini, walaupun ada beberapa masih terjadi hujan itu ya, tetapi beberapa lokasi ini terbakar seperti itu. Pulang pisau itu kita betul-betul waspada, karena pulang pisaukan lahan gambut ciri khasnya gambut kalau sudah terbakar kan sudah teradi kebakaran dibawah permukaan itu kita sudah kewalahan. Tapi untuk terkait bulannya itu biasanya dibulan 6-10”⁷⁴

Berdasarkan penuturan dari bapak AP bahwa secara umum periode untuk antisipasi kebakaran hutan dimulai dari bulan juni sampai dengan bulan oktober. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 masih terdapat kebakaran walau masih ada hujan yang turun. Pada wilayah pulang pisau kewaspadaan lebih ditingkatkan karena disana merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan apabila terbakar bisa terjadi kebakaran dibawah permukaan yang sulit untuk dipadamkan.

Kemudian pertanyaan ketiga bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Berikut penuturannya.

Penuturan Subjek III Bapak AP :

“Kalo dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, kita bersyukur sejak kejadian besar dulu tahun 2015 kita itu kesiapsiagaannya semakin baik, nah 2016 relatif aman dan 2017 semoga relative aman juga, karena TNI polri luar biasa sudah, karena TNI, Polri itu mulai dari sepanjang tahun itu pencegahannya luar biasa sosialisasi, patroli, rumah-rumah masyarakat didatangi, orang-orang dikebun di datangi, intinya begitulah mereka itu dan itu sangat membantu kita

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AP pada hari Rabu 09 Agustus 2017.

agar tidak sampai terjadi yang besar. Kalau pun sampai kejadian kan kita sudah siap, sebelum jadi besar kita padamkan semua.”⁷⁵

Berdasarkan penuturan bapak AP bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah semakin baik, sejak kejadian kebakaran yang besar di tahun 2015 dulu sampai tahun 2016 dan 2017 ini masih relatif aman karena TNI, POLRI sudah luar biasa melakukan pencegahan dalam sosialisasi, patroli yang sangat membantu agar tidak sampai terjadi kebakaran yang besar, dan jika terjadi kebakaran pemadaman sudah siap dilakukan.

C. Analisis Data Tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Dalam Pengendalian Karhutla Di kota Palangka Raya

1. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Di Kota Palangka Raya

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷⁶ Prinsip sendiri merupakan suatu asas kebenaran yang menjadikan pokok dasar berpikir, dan bertindak, sehingga prinsip dijadikan patokan dalam bertindak agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini ekonomi hijau adalah ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak AP pada hari Rabu 09 Agustus 2017.

⁷⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. . . hal. 915

signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.⁷⁷

Di Indonesia, terkhusus Kalimantan Tengah secara sosiologi, masyarakatnya merupakan masyarakat yang agraris dan menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya alam termasuk hutan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pangan, masyarakat lokal melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar (*slash and burn*) untuk perladangan padi di lahan kering. Kebiasaan turun temurun dari masyarakat lokal ini biasanya mereka menyiapkan lahan bagi penanaman padi itu dilakukan pada bulan Agustus – September pada akhir musim kemarau.⁷⁸

Kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini merupakan proses kegiatan masyarakat dalam melakukan produksi dan konsumsi. Masyarakat petani membuka lahan dengan membakar agar dapat menanam padi yang hasilnya kemudian dapat dikonsumsi dan di jual kembali. Dalam kegiatan produksi membuka lahan dengan cara dibakar ini petani tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan dapat memberikan hasil tanah yang baik dan subur sehingga hasil panen yang didapat baik dan menguntungkan. Bagi masyarakat yang memang bermata pencaharian bertani, membuka lahan dengan cara membakar ini sangat membantu dalam biaya produksi dan hasil panen yang didapatkan.

⁷⁷ Hijauku, <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/> (Diakses pada hari rabu tanggal 01 Maret 2017 pukul 12.30 WIB).

⁷⁸ Pemerintah Prov. Kalteng Badan Lingkungan Hidup, *Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Pembakaran Hutan dan Lahan*, Palangka Raya, 2016. Hal. 4.

Sejak dulu di Indonesia sudah terdapat kebijakan yang membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan, yang telah dibuat dari tingkatan atas sampai bawah, yaitu dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Kebijakan yang dibuat untuk menjelaskan pentingnya lingkungan hidup dan pelarangan pembakaran hutan dan lahan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam agar tidak melakukan eksploitasi dan kerusakan yang dapat merugikan banyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari bagaimana kebijakan dan penerapan kebijakan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk kota Palangka Raya yang telah penulis wawancarai yakni dapat dipahami bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan kebijakan terkait pembakaran hutan dan lahan sejak dulu. Sebagaimana pada bab II dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat pada UUD Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UUD Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peraturan Daerah (Perda-Kalimantan Tengah) Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam penerapan kebijakan yang pemerintah lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi seperti melalui baliho, dan sepanduk yang berisi larangan dan bahayanya kebakaran jika terjadi, kemudian apel kesiapsiagaan yang dilakukan guna penyadartahuan untuk masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan usaha agar kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat di minimalisir. Dengan mensosialisasikan dan penyadartahuan akan larangan dan sanksi membakar hutan dan lahan di harapkan masyarakat bisa berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran secara sengaja dan membantu dalam pengendalian jika terjadi kebakaran. Hal ini selaras dengan perintah Allah tentang wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang larangan membakar hutan dan lahan untuk kemaslahatan manusia yaitu pada QS. An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di Kalimantan Tengah termasuk kota Palangka Raya pada saat waktu tertentu pembakaran lahan untuk pertanian masih diperbolehkan tetapi sangat terbatas dan berijin, namun dalam pembakaran tersebut

dilakukan penjagaan dan bukan dalam musim kemarau. Pelarangan pembakaran lahan yang ada di iringi dengan solusi arahan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) masyarakat di harapkan mau dan bisa belajar bagaimana melakukan pertanian tanpa harus membakar. Pemerintah daerah juga telah memberikan program cetak lahan bagi masyarakat tani agar mereka mempunyai lahan untuk bertani dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar lagi. Dengan adanya pelaranga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah sesuai dengan terapan output dari ekonomi hijau yaitu kegiatan ekonomi yang ber emisi karbon rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam prinsip ekonomi hijau (*green economy*) melihat kepada kebijakan dan penerapan kebijakan yang ada maka peneliti menjabarkan hasil pengamatan penerapan prinsip ekonomi hijau di Kota Palangka Raya berdasarkan beberapa prinsip yang ada.

Prinsip mengutamakan nilai guna, nilai instrinsik, dan kualialitas⁷⁹ dari kebijakan larangan membakar hutan dan lahan merupakan prinsip dasar dari ekonomi sebagai ekonomi pelayanan yaitu pelayanan terhadap kebutuhan lingkungan yang tidak hanya milik manusia tetapi juga milik ekosistem seperti hewan, pohon, dan tanaman. Kebijakan pelarangan ini penting karena, jika hutan atau lahan dibakar itu jelas dapat merusak

⁷⁹ Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau* . . . hal. 201.

lingkungan yang berimbas kepada berkurangnya kebutuhan bagi ekosistem sekitar juga merusak kehidupan ekosistem yang ada. Dan untuk manusia sendiri itu merupakan musibah yang akan merusak alam dengan asap yang ditimbulkannya. Hal ini sesuai dengan harapan dari keluaran ekonomi jauh dengan menuju pada emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah.

Prinsip mengikuti aliran alam, yang artinya semua sesuatu dilakukan dengan pemberbaharuan siklus berputar, tidak hanya berpatok pada sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui namun juga pada sumber daya alam yang alamiah, yang mana perlu diperhatikan dan perbaharui. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Pasal 2 UU No. 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

“negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.”⁸⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap kelangsungan hidup alam yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam produksi yaitu nilai produksi berwawasan jangka panjang, hal ini menjelaskan bahwa produsen dalam memproduksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek namun juga harus berorientasi jangka panjang.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Prinsip skala tepat guna/skala keterkaitan, yang artinya sekecil-kecilnya aktivitas akan mempunyai dampak yang lebih besar.⁸¹ Berkaitan pelarangan membakar hutan dan juga sosialisasi dilakukan oleh pemerintah maka ini merupakan suatu hal yang besar, karena dengan mensosialisasikan bagaimana bahayanya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat dan memberikan peringatan apabila melakukan pembakaran akan mendapatkan sanksi dan denda menjadi harapan agar masyarakat lebih berhati-hati dan peduli terhadap sekelilingnya dan juga dengan lahan-lahan kosong yang mereka punya agar terhindar dari kebakaran dan bencana asap, maka ini merupakan skala keterkaitan yang baik. Dan juga jika hutan yang merupakan lahan kosong itu dilakukan perlakuan yang baik seperti dilakukan penebangan bukan pembakaran maka kita sudah menjaga regenerasi dari pertumbuhan yang ada disekitar kita dan tidak merugikan orang lain itu yang terpenting.

Prinsip kreativitas dan pengembangan masyarakat yaitu mengubah tempat sumber produksi menuju suatu produktivitas alam yang spontan memasyarakatkan suatu kreativitas. Dengan adanya program pemerintah cetak lahan membantu masyarakat untuk berkembang memaksimalkan lahan yang sudah diberikan pemerintah tanpa harus membakar lahan. Disamping itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam produksi yang mana dalam produksi harus menghormati hak individu, dengan adanya cetak lahan masyarakat tidak lagi melakukan praktek lahan berpindah, mereka

⁸¹ Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau* . . . hal. 201.

tetap pada satu lahan yang sama. Dan juga dapat mengembangkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan pembukaan lahan tanpa bakar hasil dari cetak lahan tersebut.

Dalam hal membakar hutan dan lahan memang bagi sebagian orang atau kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan produksi. Beberapa pemberitaan yang selama ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum seperti perusahaan yang tidak bertanggung jawab melakukan pembukaan lahan yang berakibat musibah asap. Pemberitaan seperti itu seharusnya tidak ada, karena kegiatan produksi yang benar adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia banyak. Sebagaimana dalam teori produksi yang mengatakan bahwa setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, dimana produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia.⁸²

Kegiatan produksi harus mendahulukan kebutuhan *D}aruriyyat* yang merupakan kemestian dan landasan hukum dalam menegakkan kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pengabaian terhadap kelima unsur ini dilakukan maka dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang

⁸² M.Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi Konvensional . . .* hal. 148.

nyata diakhirat kelak. Dengan adanya pelarangan membakar hutan dan lahan itu sudah secara tidak langsung sesuai dengan teori *fiqh bi'ah* yang mana pelarangan membakar hutan dan lahan bisa meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan yang artinya lingkungan dapat tetap terjaga, dan tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Menjaga alam dengan mengurangi kerusakan merupakan tujuan dari *Maqasid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia yang terdiri dari pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam menjalankan suatu produksi semua orang harus menyadari bahwa sesungguhnya alam dan juga sumber daya yang diperoleh darinya bukan hanya diperuntukkan untuk diri sendiri dan kehidupan masa kini. Akan tetapi jauh kedepan generasi yang akan datang juga mempunyai hak yang sama atas alam ini.

Akhirnya hemat peneliti bahwa prinsip ekonomi hijau yang dilihat dari kebijakan dan penerapan kebijakan yang ada sudah terlaksana. Dari sisi Perda dan Pergub di Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat banyak. Untuk menjalankan semua prinsip ekonomi hijau sendiri perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dan itu memang perlu memakan waktu yang tidak sebentar.

Sedangkan untuk masyarakat yang terbiasa dengan membuka lahan secara bakar, di usahakan untuk tidak melakukan pembakaran kembali namun belajar untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar(PLTB).

Dengan pemberian program cetak lahan diharapkan masyarakat bisa mengembangkan ilmu pertanian mereka tanpa bakar, dan menjadi kebiasaan baru dalam bertani. Namun jika terpaksa harus membakar, maka lakukan dengan koordinasi masyarakat setempat dan bukan pada saat musim kemarau.

2. Pengendalian Karhutla Di kota Palangka Raya

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Kebakaran hutan sendiri merupakan kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. ⁸³

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada periode 9 tahunan terdapat 2 titik puncak kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah yaitu pada

⁸³ Mea Saputra, <http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 14.40 WIB).

tahun 2006 dengan jumlah titik panas 30.297 dan pada tahun 2015 dengan jumlah titik panas 30.244. Kedua titik panas ini menandakan bahwa Kalimantan Tengah merupakan tempat yang paling tinggi titik panasnya. Pada tahun itu kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tak terkendali terjadi.⁸⁴

Melihat pada hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya sudah cukup baik. Pengendalian yang dilakukan penanggulangan kebencanaan dalam usaha meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melakukan penerapan 3 fase. Yang mana fase pertama yaitu pra bencana dilakukannya sosialisasi, patrol, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fase kedua yaitu fase kesiapsiagaan dengan melakukan apel siaga yang dilakukan ketika menjelang musim kemarau, yang terdapat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di fase terakhir yaitu dengan melakukan fase pemulihan dengan melakukan kegiatan memulihkan keadaan setelah melalui bencana darurat asap. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya sudah baik. Sejak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 yang begitu parah kemudian melihat kepada 2 tahun terakhir ini kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dan relatif aman. Bencana asap tak terlihat pada dua tahun terakhir.

⁸⁴ Pemerintah Prov. Kalteng Badan Lingkungan Hidup. . . hal. 11.

Di kota Palangka Raya sendiri telah dibuat rencana kontijensi yaitu rencana yang siap dilakukan apabila terjadi bencana kebakaran asap, sehingga tidak kebingungan harus berbuat apa jika terjadi bencana kebakaran asap. Dari hal ini dilihat bahwa penerapan pelarangan membakar hutan dan lahan dengan melakukan sosialisasi dan pencegahan maka sudah sesuai dengan tujuan dari ekonomi hijau yang bertujuan agar tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana ini ditandai dengan tidak adanya asap dalam tahun-tahun terakhir sejak 2015. Membaiknya keadaan hutan dan lingkungan akan dapat memperbaiki keadaan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan bagi generasi sekarang dan selanjutnya. Dari situ penjagaan terhadap keturunan (*h}ifz al- nasl*) dapat terlaksana. Dengan memberikan sumber daya alam yang baik kepada anak cucu generasi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang diperoleh dari lapangan, berikut kesimpulannya :

1. Penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) di kota Palangka Raya sudah terlaksana. Penerapan melalui kebijakan pelarangan membakar hutan dan lahan, dengan melalui sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan dan melakukan apel kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana asap. Pelarangan membakar hutan dan lahan juga beriringan dengan solusi pemerintah yang mengarahkan masyarakat untuk membuka lahan pertanian dengan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan juga memberikan program cetak lahan bagi masyarakat. Dengan ini penerapan prinsip ekonomi hijau dengan melihat pada kebijakan dan penerapan kebijakan yang ada sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan melihat pada kegiatan yang dilakukan oleh penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase yaitu fase pra bencana, kesiapsiagaan, dan pemulihan, kemudian pada tahun-tahun terakhir yaitu tahun 2016-2017 maka dapat dilihat bahwa pengendaliannya sudah membaik.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan bahwa ekonomi hijau merupakan sebuah tujuan yang baik untuk masa depan, dengan itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkannya. Untuk itu peneliti memberi saran, yaitu :

1. Untuk pemerintah terus tingkatkan sosialisasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penjagaan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran. Dan juga terutama kepada solusi yang diberikan pemerintah untuk terus bantu, awasi, dan dampingi dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat mengembangkan pembukaan lahan tanpa bakar dengan baik dan dapat menjadikan lahan tersebut berproduksi.
2. Untuk masyarakat diharapkan mau bekerja sama untuk menjadikan alam tetap terjaga, dengan tidak membakar lahan dan juga menjaga lahan-lahan kosong agar terhindar dari kebakaran. Kemudian dalam menjalankan program pembukaan lahan tanpa bakar diharapkan masyarakat untuk terus berusaha tetap semangat dan melakukan kreativitas untuk menjadikan lahan tanpa bakar bisa sukses dan dapat bermanfaat hingga generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Awatara, I Gusti Putu Diva, *Tingkat Kinerja Perusahaan Agroindustri Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Menuju Sistem Ekonomi Hijau Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2015.

Arif Mustofa, Bahri *Implementasi Kebijakan Larangan Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam wilayah kota bandar lampung*, Skripsi Universitas Lampung, 2016.

Dakhoir, Ahmad *Pengaturan & Integrasi kelembagaan Pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Khakimah, Hidayatul *Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan Green Constitution*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2016.

Karim, Adiwarman Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.

Meleong, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Ofiset, 2001.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.

Mattew B. Milles Dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta :UI-Press, 1992.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2005.

Prakosa, Ali *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)*, Universitas Sebelas Maret, 2007.

Rianto , M.Nur Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rasyid, Fachmi *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Widyaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, Edisi 1 Nomor 4 Oktober – Desember 2014.

Sukirno, Sadono *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Setia Z, Alam *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Tjahja D, Surna dkk , *Green Economy Ekonomi Hijau edisi revisi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2014.

Tjahja D, Surna Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013.

Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Yunia Fauziah, Ika Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah*, Jakarta, Kencana, 2014.

Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan.

Jurnal :

Ida Nurlinda, *Konsep Ekonomi Hijau (Green Econonic) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Hal. 7.

Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, *Langkah menuju ekonomi Hijau, Sintesa dan Memulainya*.

Internet :

www.reddplus.go.id/berita/opini-dan-kajian/352-ekonomi-hijau-solusi-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan

<http://alamendah.org/2012/06/03/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy/>

<http://alamendah.org/2012/06/03/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy/>

<http://m.sampit.prokal.co/read/news/229-diduga-sengaja-bakar-lahan-tiga-perusahaan-dipasangi-garis-polisi.html>

<http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/>

<http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf>

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kebijakan pembakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penerapan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya ?
3. Bagaimana menurut bapak pelarangan membakar ini, dan bagaimana bagi masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara membakar ?
4. Apakah dalam pembuatan kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya ini ada dikaitkan dengan ekonomi hijau ?
5. Bagaimana pengendalian karhutla di kota Palangka Raya ?
6. Bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 kebakaran yang parah itu pak ?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Saat melakukan wawancara bersama Bapak ACP (Narasumber 1)



Gambar 2. Saat melakukan wawancara bersama Bapak ACP dan Bapak AZ
(Narasumber 1 dan 2)



Gambar 3. Berkunjung ke Posko Siaga Darurat



Gambar 4. Saat wawancara bersama Bapak AP (Narasumber 3)



Gambar 5. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan



Gambar 6. Sosialisasi melalui Banner



Gambar 7. Sosialisasi Melalui Spanduk

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Titik Panas di Provinsi-Provinsi Pulau Kalimantan

Tahun	Kalimantan Barat		Kalimantan Tengah		Provinsi Lainnya		Jumlah Titik
	Titik	%	Titik	%	Titik	%	
2006	13.622	25,58	30.297	56,89	9.335	17,53	53.254
2007	3.018	35,25	2.954	34,50	2.590	30,25	8.562
2008	3.167	52,09	1.490	24,51	1.423	23,40	6.080
2009	12.068	33,89	15.552	43,67	7.992	22,44	35.612
2010	1.393	41,71	440	13,17	1.507	45,12	3.340
2011	4.978	32,85	6.163	40,67	4.011	26,47	15.152
2012	6.770	42,02	6.074	37,70	3.267	20,28	16.111
2013	3.859	38,90	3.665	36,95	2.396	24,15	9.920
2014	9.079	30,42	13.322	44,64	7.445	24,94	29.846
2015	7.993	14,70	30.244	55,62	16.140	29,68	54.377
Jumlah	65.947	28,39	110.201	47,45	56.106	24,16	232.254

Sumber : <https://earthdata.nasa.gov/> + analisis

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Asiyah
Tempat, Tgl lahir : Bahaur Tengah, 06 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Cilik Riwut Km. 4 Jl. Mutiara no. 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Nomor Hp : 0816-4938-9934
Email : aisyahesy@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

- 2001-2007 : SDN 02 Bukit Tunggul, Jl. Intan Palangka Raya
- 2007-2010 : Mts. An-Nur , Jl. S.Parman Palangka Raya
- 2010-2013 : MAN MODEL Palangka Raya, Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya

BIODATA ORANG TUA

- Nama Bapak : Asnayani
Pekerjaan : Tidak bekerja
- Nama Ibu : Mariam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Cilik Riwut Km. 4 Jl. Mutiara no. 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Gambar 8. Jumlah dan titik panas dari tahun 2006 s/d 2015

LUAS KEBAKARAN TAHUN 2017

No	Kabupaten	Bulan										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Barsel				2.00			1.00	1.50	30.00	5.81	40.31
2	Bartim								1.00	3.50		4.50
3	Barut							11.00		30.53	1.50	43.03
4	Gunmas		3.12		0.20					3.10		6.42
5	Kapuas					1.25	1.00		10.00	119.40	189.00	320.65
6	Katingan		3.03			1.00	6.00	2.00		2.00	2.00	16.03
7	Kobar		1.00			2.00		0.53	0.25	52.04		55.82
8	Kotim		3.00						2.00	73.38	3.96	82.33
9	Lamandau								6.03	14.80	1.00	21.83
10	Mura								3.00	30.76		33.76
11	P.Raya	1.00	24.50	0.44				12.50	18.90	43.87	0.50	101.71
12	Pulpis					0.44	5.00			264.82	138.00	408.26
13	Seruyan						0.50	4.00	12.50		8.00	25.00
14	Sukamara			1.00				0.10	76.01	69.44		146.55
	Grand Total	1.00	34.65	1.44	2.20	4.69	12.50	31.13	131.19	737.64	349.77	1306.20